

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

LPP RRI Padang merupakan salah satu RRI daerah yang ada di Indonesia yang bertempat di alamat Jl. Jend. Sudirman No.12 Kota Padang, Sumatera Barat. RRI Padang di bangun pada tahun 1950. LPP RRI Padang memiliki 10 pemancar relay di 10 Kabupaten Kota dan menjangkau hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Programa yang ada di LPP RRI Padang adalah :

- Pro 1 Pusat Pemberdayaan Masyarakat -FM 97.5 MHz
- Pro 2 Pusat Kreatifitas Anak Muda -FM 90.8 MHz
- Pro 3 Suara Identitas KelIndonesiaan -FM 88.4 MHz
- Pro 4 Ensiklopedia Budaya Ke-Indonesiaan -FM 92.4 MHz

VISI

Menjadikan LPP RRI radio berjangkauan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.

MISI

1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreativitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa.
3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.
4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran.
8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisienkan pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik.
9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (good corporate governance).
10. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan

TUJUAN

"memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI"

NILAI-NILAI RRI

- 1) Siaran bersifat independen dan netral
- 2) Siaran harus memihak pada kebenaran
- 3) Siaran memberi pemahaman
- 4) Siaran mengurangi ketidakpastian
- 5) Siaran berpedoman pada pancasila, UUD 1945 dan kebenaran, serta peraturan yang lainnya.
- 6) Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7) Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan Kedaulatan NKRI

PERAN RRI

- 1) Peran dalam pemberdayaan masyarakat
- 2) Peran RRI sebagai pelestari budaya bangsa
- 3) Peran RRI sebagai pelestari lingkungan
- 4) Peran RRI sebagai media pendidikan
- 5) Peran RRI sebagai media diplomasi
- 6) Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana
- 7) Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar Negeri
- 8) Peran RRI sebagai media hiburan
- 9) Peran RRI dalam sabuk pengaman informasi (Information Safety Belt)

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh RRI Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh LPP RRI yang merupakan entitas pelaporan dari RRI Padang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	559,740,000	-
Jumlah Pendapatan	559,740,000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	7,223,446,000	-
Belanja Barang	3,494,092,000	-
Belanja Modal	400,000,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	11,117,538,000	-

Realisasi Pendapatan
Rp820,467,841

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp820,467,841 atau mencapai 146.58 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp559,740,000. Pendapatan RRI Padang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp820,467,841.

Pendapatan ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	820,467,841	-
Jumlah	-	820,467,841	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 319.42 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	820,467,841	195,620,101	319.42
Jumlah	820,467,841	195,620,101	319.42

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar 0.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 820,467,841 dan Rp 195,620,101. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 319,42 dari TA 2022. Kenaikan terbesar dari tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya pendapatan sewa gedung, tanah, dan bangunan berupa kontrak PT. Telkomsel dan Situ Koffie.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	820,467,841	195,620,101	319.42
Jumlah	820,467,841	195,620,101	319.42

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	137,160,968	13,149,621	943.08
Pendapatan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	549,460,000	-	-
Pendapatan Jasa Siara LPP RRI	130,750,000	163,010,000	(19.79)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,096,873	19,440,480	(84.07)
Pendapatan Anggaran Lain-lain		20,000	
Jumlah	820,467,841	195,620,101	319.42

B.2 Belanja

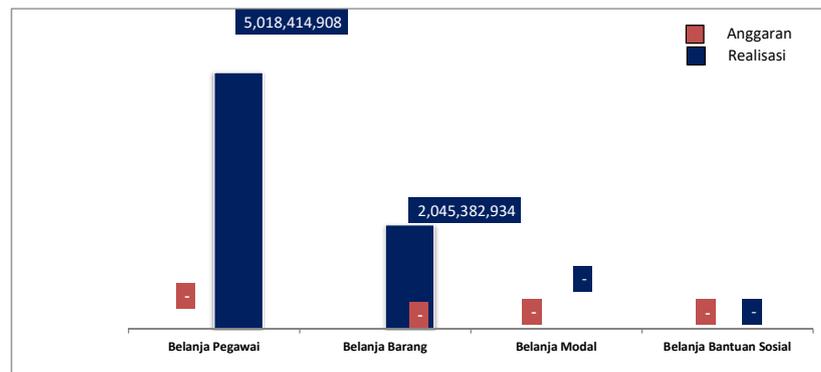
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp7,063,797,842 atau 63.54 % dari anggaran belanja sebesar Rp.11,117,538,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	7,223,446,000	5,018,414,908	69.47
Belanja Barang	3,494,092,000	2,045,382,934	58.54
Belanja Modal	400,000,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	11,117,538,000	7,063,797,842	63.54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 9.04% Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 4,876,840,196. Belanja Negara pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp 4,568,660,015. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	5,018,414,908	4,964,754,277	1.08
Belanja Barang	2,045,382,934	2,352,320,974	(13.05)
Belanja Modal	-	449,050,000	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7,063,797,842	7,766,125,251	(9.04)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp5,018,414,908

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,018,414,908 dan Rp4,964,754,277. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Terdapat kenaikan belanja pegawai pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah belanja pegawai mencapai Rp 5,018,414,908. Kenaikan ini disebabkan adanya pegawai yang mengalami kenaikan pangkat/golongan. Penambahan pegawai PPPK yang baru diangkat, serta kenaikan ini juga disebabkan adanya penambahan jumlah anggota keluarga pegawai yang mengakibatkan jumlah tunjangan menjadi meningkat.

Perbandingan Belanja Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,053,230,500	1,114,391,700	(5.49)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,744	17,479	(15.65)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56,000,126	56,158,402	(0.28)
Belanja Tunj. Anak PNS	12,737,450	16,283,874	(21.78)
Belanja Tunj. Struktural PNS	29,005,000	93,135,000	(68.86)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	134,991,000	135,781,000	(0.58)
Belanja Tunj. PPh PNS	11,175,713	10,172,093	9.87
Belanja Tunj. Beras PNS	41,134,560	44,683,140	(7.94)
Belanja Uang Makan PNS	145,136,000	146,501,000	(0.93)
Belanja Tunjangan Umum PNS	24,200,000	23,365,000	3.57
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	486,459,600	1,322,534,700	(63.22)
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	88,375,766	230,512,842	(61.66)
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS	100,989,000	215,355,000	(53.11)
Belanja Gaji Pokok PPPK	729,826,800	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,557	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	59,930,080	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	16,471,726	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	119,570,000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	56,125,500	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	124,438,000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,166,523,298	1,596,044,277	(26.91)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja F	573,832,677	-	-
Jumlah Belanja kotor	5,030,177,097	5,004,935,507	0.50
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	125	40	212.50
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	11,762,064		
Jumlah Belanja	5,018,414,908	5,004,935,467	0.27

Realisasi Belanja
Barang
Rp2,045,382,934

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,045,382,934 dan Rp2,352,320,974. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 39.83% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Belanja Barang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 belanja barang yang terjadi sebesar Rp 2,045,382,934. Pada tahun ini belanja barang yang paling banyak terdapat pada belanja tagihan listrik dan belanja jasa.

Perbandingan Belanja Barang Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Keperluan Perkantoran	45,365,113	220,726,773	
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	857,000	519,000	
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95,840,000	82,480,000	
Belanja Bahan	90,188,000	136,508,000	
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,350,000	11,400,000	
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	568,900	-	
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,109,125	74,000,355	
Belanja Langganan Listrik	652,005,959	570,894,288	
Belanja Langganan Telepon	68,959,649	77,098,788	
Belanja Langganan Air	881,000	1,051,600	
Belanja Sewa	39,069,000	12,390,000	
Belanja Jasa Profesi	222,296,784	220,409,766	
Belanja Jasa Lainnya	209,820,000	2,700,000	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78,981,100	229,141,688	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	30,000,000	29,806,918	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135,419,972	162,576,109	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,225,000	28,830,000	
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,620,000	24,018,790	
Belanja Pemeliharaan Jaringan	17,495,700	90,553,215	
Belanja Pemeliharaan Lainnya	115,246,800	240,910,434	
Belanja Perjalanan Biasa	68,746,201	109,850,000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59,209,000	1,320,000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,128,631	10,400,000	
Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi COVID-19		14,735,250	
Jumlah Belanja Kotor	2,045,382,934	1,462,751,256	39.83
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,045,382,934	1,462,751,256	39.83

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp449,050,000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh Pada tahun 2023 tidak terdapat belanja modal baik itu berupa belanja peralatan dan mesin maupun belanja gedung dan bangunan..

Perbandingan Belanja Modal Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	249,600,000	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	199,450,000	(100.00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	449,050,000	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	449,050,000	(100.00)

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada belanja tanah dan belanja modal pembuatan sertifikat tanah..

Perbandingan Belanja Modal Tanah Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp249,600,000, mengalami penurunan sebesar 100.00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	49,900,000	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	-	49,900,000	(100.00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	49,900,000	(100.00)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp199,450,000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 Tidak ada belanja modal gedung dan bangunan maupun rehabilitasi gedung dan bangunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan Tidak ada belanja modal irigasi baik tahun 2023 maupun tahun 2022..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan Tidak terdapat belanja modal Lainnya baik itu pada tahun 2023 maupun tahun 2022..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 0. Hal ini dikarenakan situasi yang sudah kembali normal dan tidak ada lagi belanja sosial dalam penanganan pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Pada laporan realisasi anggaran per 30 September 2023, untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 3,2%, sedangkan untuk Belanja negara telah terealisasi sebesar 43%.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp90,000,000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.90,000,000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Triwulan III TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas dibendahara pengeluaran	90,000,000	-
	-	-
Jumlah	90,000,000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas yang ada di bendahara pengeluaran per 30 september 2023 sebesar Rp 90,000,000.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Triwulan III TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak ada bendahara penerimaan

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0*

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Triwulan III TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Tidak ada beban barang yang di bayar dimuka

*Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0*

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0*

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp2,000,000. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Triwulan III TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	-	2,000,000
Jumlah	-	2,000,000

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Pada tahun 2023 tidak ada pendapatan yang masih harus diterima.

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Perpajakan Rp0*

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

C.9 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp
27,362,731

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp27,361,731 dan Rp5,400,000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	791,731	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	26,570,000	5,400,000
	-	-
Jumlah	27,361,731	5,400,000

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp3,248,150

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3,248,150 dan Rp5,400,000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Triwulan III TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	9,630,000	0,5%	48,150
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	3,200,000	100%	3,200,000
Jumlah	12,830,000		3,248,150

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran Rp
0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0.

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih- Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran Rp
0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan Rp 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan piutang tidak
tertagih- Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Rp 0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Triwulan III TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.15 Persediaan

Persediaan Rp 2,256,100 dan Rp 874,950

Nilai Persediaan tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2,256,100 dan Rp874,950. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Triwulan III TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	2,256,100	752,850
Bahan untuk Pemeliharaan	-	122,100
Bahan Baku	-	-
	-	-
Jumlah	2,256,100	874,950

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang terdiri dari barang konsumsi sebesar Rp 2,256,100

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan Belum Diregister Rp 0

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp 0

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp 0

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 September 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp 0

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 September 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang Rp 0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertahiran Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 September 2023 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

C.21 Tanah

Tanah Rp 115,004,169,000

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp115,004,169,000 dan Rp115,004,169,000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	115,004,169,000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 30 September 2023	115,004,169,000

Rincian saldo Tanah per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Triwulan III TA 2023

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	5,153	Sudirman No 12 Padang	21,705,209,000
2	53,565	Gunung Sarik	68,295,375,000
3	11,549	Flamboyan	25,003,585,000
	Jumlah		115,004,169,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah dalam kondisi baik

C.22 Tanah Belum Diregister

Tanah Belum Diregister
Rp 0

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.23 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp
15,294,513,299

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp15,425,003,799 dan Rp15,296,853,299. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	15,296,853,299
Mutasi tambah:	
Pembelian	568,899
Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
Saldo per 30 September 2023	15,297,422,198
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(12,797,704,371)
Nilai Buku per 30 September 2023	2,499,717,827

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Bertambahnya peralatan dan mesin
-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-
-

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp 0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

C.25 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp 8,459,374,800

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8,459,374,800 dan Rp7,910,898,800. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	7,910,898,800
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 September 2023	7,910,898,800
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(2,889,170,638)
Nilai Buku per 30 September 2023	5,021,728,162

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp
594,402,000

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp.594,402,000 dan Rp.594,402,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	594,402,000
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	594,402,000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(399,116,400)
Nilai Buku per	195,285,600

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Belum
Diregister Rp 0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp
60,510,000

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp.60,510,000 dan Rp.60,510,000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	60,510,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 September 2023	60,510,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(60,510,000)
Nilai Buku per 30 September 2023	-

Mutasi tambah/kurang:

Aset Tetap Belum
Diregister Rp 0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP muncul karena kesalahan penginputan operator terdahulu sehingga muncul KDP dan pada saat migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI muncul akibat normalisasi K3 Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp
16,146,501,409

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp16,146,501,409 dan Rp15,346,672,773. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Triwulan III Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	15,425,003,799	(12,797,704,371)	2,627,299,428
2	Gedung dan Bangunan	8,459,374,800	(2,889,170,638)	5,570,204,162
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	594,402,000	(399,116,400)	195,285,600
4	Aset Tetap Lainnya	60,510,000	(60,510,000)	-
Akumulasi Penyusutan		24,539,290,599	(16,146,501,409)	8,392,789,190

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp 0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud Rp
0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada RRI Padang berupa Software.

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp 0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp 0

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp 0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Aset Lain-lain Rp
3,854,232,926

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp3,854,232,926 dan Rp3,854,232,926. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	3,854,232,926
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 September 2023	3,854,232,926
Akumulasi Penyusutan 30 September 2023	(3,854,232,926)
Nilai Buku per 30 September 2023	-

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp 0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 3,854,232,926

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp3,854,232,926 dan Rp3,848,127,926. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	3,854,232,926	(3,854,232,926)	-
	-	-	-
Total	3,854,232,926	(3,854,232,926)	-

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 268,434,990

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp268,434,990 dan Rp65,754,548. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	268,434,990	-
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
Total	268,434,990	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Ini muncul karena masih ada tanggungan pembayaran pada bulan berikutnya berupa beban gaji PNS, PPPK, maupun non PNS untuk bulan Oktober.

Utang yang Belum Ditagihkan Rp 21,117,000

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21,117,000 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Hibah yang Belum Disahkan Rp 0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp 0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp 522,310,819

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp522,310,819 dan Rp55,416,125. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2022
Pendapatan diterima dimuka	522,310,819	55,416,125
Total	522,310,819	55,416,125

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pada tahun 2023 terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 522,310,819. Pendapatan diterima dimuka ini merupakan kontrak dari PT. Telkomsel, Delli Nataliana, dan Situ Koffie.

Uang Muka dari KPPN
Rp 90,000,000

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp90,000,000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	90,000,000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	90,000,000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang muka dari KPPN berupa uang persediaan (UP) sebesar Rp 90,000,000

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp 0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Ekuitas Rp
123,407,969,603

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp122,611,465,062. dan Rp123,407,969,603. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

Nilai antara Aset dengan Utang serta Ekuitas sudah sama (balance)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp 0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah

Rincian Pendapatan Perpajakan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Rp
370,438,005

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 370,438,005 dan Rp176,327,540. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 110.09. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan, pendapatan jasa siaran, dan pendapatan menggunakan sarana dan prasana sesuai tusi.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	139,116,449	13,297,540.00	946.18
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	81,401,556	-	-
Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	149,920,000	163,010,000.00	(8.03)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	20,000.00	(100.00)
Jumlah	370,438,005.00	176,327,540.00	110.09

Beban Pegawai Rp
5,286,849,898

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,286,849,898 dan Rp5,231,429,336.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 1.06 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya ini dikarenakan terdapat penambahan pegawai fungsional, dan beban lainnya. Rincian Beban Pegawai Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,144,312,200	1,213,819,100	(5.73)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15,725	18,904	(16.82)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	61,021,726	61,439,916	(0.68)
Beban Tunj. Anak PNS	13,975,204	17,679,198	(20.95)
Beban Tunj. Struktural PNS	20,247,936	55,958,810	(63.82)
Beban Tunj. Fungsional PNS	145,712,000	148,033,000	(1.57)
Beban Tunj. PPh PNS	11,500,739	10,473,072	9.81
Beban Tunj. Beras PNS	44,900,400	48,811,080	(8.01)
Beban Uang Makan PNS	145,136,000	146,501,000	(0.93)
Beban Tunjangan Umum PNS	26,400,000	25,565,000	3.27
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,166,523,298	1,596,044,277	(26.91)
Beban Tunjangan Profesi Guru	-	-	-
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	530,698,400	1,366,176,000	(61.15)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	96,412,304	238,481,158	(59.57)
Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	100,989,000	215,355,000	(53.11)
Beban Gaji Pokok PPPK	803,261,400	64,708,000	1,141.36
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,431	819	1,173.63
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	66,086,940	5,284,200	1,150.65
Belanja Tunjangan Anak PPPK	18,063,678	1,473,822	1,125.63
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	131,610,000	10,610,000	1,140.43
Belanja Tunjangan Beras PPPK	61,701,840	4,996,980	1,134.78
Belanja Uang Makan PPPK	124,438,000	-	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja F	573,832,677	-	-
	-	-	-
Jumlah	5,286,849,898	5,231,429,336	1.06

Beban Persediaan Rp
83,952,975

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp83,952,975 dan Rp85,582,670

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp 83,952,975 dibandingkan tahun 2022 yaitu Rp 85,582,670.

Rincian Beban Persediaan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	83,952,975	85,582,670	(1.90)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	83,952,975.00	85,582,670	(1.90)

Beban Barang dan Jasa
Rp 1,384,873,857

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,384,873,857 dan Rp1,391,520,345.

Beban barang dan Jasa yang terdiri dari beban barang dan jasa berupa barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,71% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan beban barang dan jasa disebabkan oleh banyaknya kegiatan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	45,365,113	244,806,773	(81.47)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	857,000	519,000	65.13
Beban Bahan	92,638,000	136,508,000	(32.14)
Beban Langganan Listrik	589,006,476	570,894,288	3.17
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,840,000	92,790,000	3.29
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,350,000	11,400,000	(53.07)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Langganan Telepon	66,204,584	77,098,788	(14.13)
Beban Langganan Air	881,000	1,051,600	(16.22)
Beban Sewa	50,446,000	12,390,000	307.15
Beban Jasa Profesi	225,146,784	241,361,896	(6.72)
Beban Jasa Lainnya	212,570,000	2,700,000	7,772.96
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	568,900	-	-
Jumlah	1,384,873,857	1,391,520,345.00	(0.48)

Beban Pemeliharaan
Rp 378,763,572

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp378,763,572 dan Rp561,196,920.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,51% dibandingkan Tahun 2022. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78,981,100	229,141,688	(65.53)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135,419,972	162,576,109	(16.70)
Beban Pemeliharaan Jaringan	17,495,700	24,638,790	(28.99)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	16,754,600	(100.00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,620,000	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	30,000,000	29,806,918	0.65
Beban Pemeliharaan Lainnya	115,246,800	98,278,815	17.27
Jumlah	378,763,572	561,196,920	(32.51)

Beban Perjalanan Dinas
Rp 151,773,832

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp151,773,832 dan Rp367,295,434

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 60,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk perjalanan dinas masih dibatasi. Berikut merupakan rincian Beban Perjalanan Dinas:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	68,746,201	245,725,434	(72.02)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60,899,000	109,850,000	(44.56)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	1,320,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,128,631	10,400,000	112.78
Jumlah	151,773,832.00	367,295,434	(58.68)

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat Rp 0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh tidak terdapat beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2023. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-
	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp 0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp
786,454,586

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp786,454,586 dan Rp633,144,233.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	532,469,072	352,657,524	50.99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	221,445,078	247,946,273	(10.69)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	23,907,224	23,907,224	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	6,105,000	6,105,000	-
Beban Penyusutan Jaringan	2,528,212	2,528,212	-
Jumlah Penyusutan	786,454,586	633,144,233	24.21
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	786,454,586	633,144,233	24.21

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih Rp
70,650

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp70,650 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNBK	70,650	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	70,650.00	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp 0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp 0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp
3,096,870

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,096,873 dan Rp19,440,480.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,096,873	19,440,480.00	(84.07)
Jumlah	3,096,873.00	19,440,480	(84.07)

Pos Luar Biasa Rp 0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Khusus
Penanganan Pandemi
Covid 19 Rp 0

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Triwulan III 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Tidak ada di anggarkan dana untuk penanganan covid 19 karena sudah normal kembali

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Tidak Ada catatan penting lainnya.

Ekuitas Awal Rp
123,407,969,603

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.123,407,969,603.00 dan Rp.123,003,929,100.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO Rp
(7,699,204,492)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.-7,699,204,492.00 dan Rp.-8,074,400,918.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar Rp 0

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas Rp (500)

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.-500 dan Rp.170,000 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp 0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp 0

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp 0

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi

Selisih Revaluasi Aset
Rp 0

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari Tidak ada Ekuitas transaksi lainnya dan Revaluasi aset tetap nya

Koreksi Atas Tetap Non
Revaluasi Rp
(2,223,000)

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.-2,223,000 dan Rp.170,000. Koreksi ini Terdapat koreksi nilai aset tetap non revaluasi pada tahun 2023 sebesar Rp 2,223,000..

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2,223,000)
Jumlah	(2,223,000.0)

Koreksi Lain-lain Rp
2,222,500

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2,222,500 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Rincian koreksi lain lain pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2,222,500. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas
Rp 6,902,700,451

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6,902,700,451 dan Rp.8,558,052,383. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,063,797,842
Diterima dari Entitas Lain	(820,467,841)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	110,894,450
Pengesahan Hibah Langsung	548,476,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
Jumlah	6,902,700,451

Transfer Masuk-Keluar
Rp 0

E.5.1 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp110,894,450 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Saldo	-	(19,596,500)
Kabel		6,066,500
Receiver STL/VHF (FM)		39,787,000
Peralatan Antena Penerima VHF		9,350,000
Power tansmitter		39,787,000
Laptop	-	35,500,000
Jumlah		110,894,000

Pengesahan Hibah
Langsung Rp
548,476,000

E.5.2 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang, maupun jasa sedangkan pencatatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp 548,476,000 dan Rp 0

Pemberi Hibah	Bentuk	Nilai
Julizar	Bangunan Surau	Rp 548,476,000
Jumlah		Rp 548,476,000

Ekuitas Akhir Rp
122,611,465,062

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.122,611,465,062.00 dan Rp.123,487,750,565.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak ada catatan penting lainnya dalam LPE

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada permasalahan terkait neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Semua akun-akun telah sesuai dan berada pada posisi yang seharusnya

Padang, 16 Oktober 2023

Kepala RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos, M.Si
NIP. 197404051994031006